

AKTUALISASI HASIL PENELITIAN ARKEOLOGI DI MALUKU REFLEKSI ARKEOLOGI MALUKU TENTANG PLURALISME, INTEGRASI SOSIAL, DEMOKRASI, DAN KEDAULATAN BANGSA

Wuri Handoko

Abstrak. Ada pelajaran berharga untuk bangsa ini tentang pemahaman atas pluralisme, demokrasi dan integritas kebangsaan yang sesungguhnya menjadi identitas nasional bangsa kita. Fenomena kebudayaan masa lampau yang dapat kita jajah melalui bukti-bukti tinggalan arkeologi, nilai-nilai filosofis dan budaya yang telah kita interpretasikan sesungguhnya mampu menjadi jembatan reintegrasi sosial sebagai bagian dalam membangun kedaulatan bangsa. Maluku, sebagai wilayah yang masyarakatnya majemuk dan pernah memiliki pengalaman pahit konflik sosial, adalah wilayah dengan potensi arkeologi yang berlimpah, dan dari yang berlimpah itu masih sebagian kecil saja yang sudah terungkap. Dari kecilnya data arkeologi yang terungkap, ternyata menyimpan makna dan nilai-nilai humanisme, pluralisme, demokrasi, yang telah berurat berakar yang bisa menjadi media membangun kemanusiaan yang lebih beradab, perdamaian, toleransi, persaudaraan, yang meskipun sempat tercerabut, tidak sampai merusak akarnya, yang jika ditanam kembali dengan baik, mampu bertumbuh dan berkembang sebagai modal membangun peradaban bangsa yang lebih maju dan bermartabat.

Kata Kunci: arkeologi, filosofis, budaya, pluralisme, demokrasi, reintegrasi sosial, kedaulatan bangsa

Abstract. There is a valuable lesson for this nation about the understanding of pluralism, democracy, and national integrity, which are actually the national characteristics of our nation. The phenomenon of past culture that we can obtain through archaeological evidences, philosophical and cultural values that we have interpreted can serve as the bridge of social re-integration as part of our effort to build national sovereignty. The Moluccas, as an area with multi-dimensional communities and has unfortunately experienced social conflicts, is an area with abundant archaeological potencies. Out of the abundant potencies, only a small part has been revealed, and it contains meanings and values of humanism, pluralism, and democracy, which are deeply rooted and can be used as the media to build more civilized humanity, peace, tolerance, and brotherhood, which had been once destroyed although not entirely perished and if we rebuild them they will grow and flourish as the base to establish more advanced and dignified national civilization.

Keywords: archaeology, philosophy, culture, pluralism, democracy, social re-integration, national sovereignty

1. Pengantar

Truman Simanjuntak dalam pidato pengukuhan sebagai professor riset menegaskan bahwa pluralism dan multikulturalisme di Indonesia adalah sebuah keniscayaan. Pluralisme dan multikulturalisme bagi bangsa ini merupakan suatu keniscayaan; sesuatu yang memang harus ada dan tak terbantahkan. Pluralisme

dan multikulturalisme yang kita miliki itu, katanya telah menciptakan mozaik yang indah dalam tampilan fisik manusia dan budaya Indonesia di sepanjang perjalanan sejarahnya. Kalau kita sebagai bangsa mau memahami fondasi keindonesiaan kita, mau belajar pada kearifan-kearifan masa lampau, konflik-konflik sosial itu tidak seharusnya terjadi. Bahwa, keindonesiaan itu dibentuk atas dasar

pluralisme dan multikulturalisme, yang telah tumbuh sejak awal kehidupan di Nusantara terbentuk¹.

Sejauh yang penulis ketahui, sesungguhnya telah banyak tema-tema yang membahas menyangkut persoalan identitas kebangsaan sebagaimana yang tertulis dalam judul artikel pendek ini. Bahwa persoalan identitas kebangsaan, merupakan diskursus panjang yang membutuhkan alat analisa yang komprehensif, mengingat bahasan ini menyentuh ke dalam persoalan etnisitas dan nasionalitas keindonesiaan, yang didalamnya berarti membincang pula pluralisme dan multikulturalisme. Indonesia sebagai sebuah negara, sebagaimana dikatakan Benedict Anderson (1999) yang dikutip Fadillah (2000) adalah komunitas imajiner (*imagined community*) yang mengkonsepkan rasa kebangsaan dibentuk dengan proses imajinasi anggota-anggota masyarakat besar melalui simbol-simbol budaya, bahasa, informasi, pendidikan dan gaya hidup (Fadillah 2001: 45). Konsep ini menurut Fadillah, mengingatkan kita pada wacana "kemerdekaan budaya" yang didalamnya mengandung semangat bahwa keragaman merupakan wacana yang harus ditempatkan sebagai fakta yang tidak dapat dimanipulasi. Bahwa Indonesia sebagai sebuah komunitas imajiner, sebagaimana dibahasakan oleh Mahmud (2002), maka Indonesia sesungguhnya dapat dipandang sebagai "meta artefak" yang tertransendensi oleh dinamika perubahan ruang, waktu, dan masyarakat. Artinya legitimasi eksistensi Indonesia turut ditentukan dukungan artefak sebagai *icon* yang berada dalam kisaran wilayah geopolitiknya sekarang (Mahmud 2002: 132).

Disini tampak pentingnya arkeologi memaknai kembali data arkeologi dalam memahami identitas nasionalitas dan kebangsaan setiap komunitas masyarakat (etnis, grup etnis, suku bangsa, dan seterusnya) dalam ruang *nation state*² bernama Republik

Indonesia. Seperti halnya yang dimaksudkan Michel Foucault, pelopor analisis diskursif, mengatakan bahwa arkeologi bertindak menyusun kembali dokumen otentik masa lalu, mengelompokkannya dalam rangkaian-rangkaian yang bermakna, dan membuatnya menjadi kesatuan - kesatuan monumental yang menempatkan kesadaran manusia sebagai subjek orisinal seluruh perkembangan sejarah, dan yang pada gilirannya memerlukan penafsiran ulang sesuai dengan peta diskursif masa kini³.

Dengan demikian, pluralism dan multikulturalisme sebagai fakta yang tidak dapat dimanipulasi (Fadillah 2001) ataupun sebagai sebuah keniscayaan (Simanjuntak 2006), dalam proses keindonesiaan *menjadi* (Mahmud 2002) harus ditempatkan sebagai nasionalisme budaya yang sekaligus model pendekatan dalam penelitian arkeologi yang nasionalistik (Fadillah 2001), Pentingnya perkembangan wacana nasionalisme Indonesia dalam kaitan dengan merebaknya isu *ethnic revivalism* (Smith 1981), dalam hal ini arkeologi berkepentingan untuk memberikan kontribusinya dalam bentuk gagasan-gagasan konseptual tentang keragaman budaya etnik kedaerahan (Fadillah 2001). Tampaknya demikian pula dengan kebijakan politik Indonesia menyoal kebudayaan nasional⁴. Sedyawati (2008) mengatakan salah satu komponen jati diri bangsa adalah kesadaran sejarah yang di dalamnya bangsa itu dapat menghayati kebersamaan berkenaan dengan masa lalunya dan kesatuan mempersiapkan masa depan.

Bahwa kebijakan politik Indonesia merupakan negara yang sekaligus diharuskan untuk memelihara proses bina - bangsa dan sekaligus bina-negara. Istilah yang pertama merujuk pada hubungan sosial, antar kelompok - keompok dalam masyarakat,

nasionalisme (Nurkhoirun 2005: 31)

1 Pernyataan Truman Simanjuntak ini penulis kutip dari tulisan Andi Amrullah berjudul *Truman dan Penelusuran Akar Kemajemukan* yang publikasikan melalui <http://amiere.multiply.com>, diakses pada tanggal 29 Juli 2011). Atau bisa dilihat karya Truman Simanjuntak (2006) *Pluralisme dan Multikulturalisme dalam Prasejarah Indonesia, Penelusuran terhadap akar Kemajemukan Masa Kini* (Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional).

2 *Nation state* menjadi semacam kontainer dari semangat

3 Launa, 2001 *Menyoal Watak Bangsa* dipublikasikan melalui <http://www.radarbanten.com/newversion/opini/1391-menyoyal-watak-bangsa-.html>, diakses tanggal 30 Juli 2011).

4 Permasalahan kebudayaan masa kini menurut Sedyawati (2008) adalah bagaimana mewujudkan, membina dan memperkembangkan kebudayaan nasional Indonesia, dengan pada waktu yang sama tidak mengabaikan kebudayaan daerah di satu sisi dan kebudayaan global dan kebudayaan agama di sisi lain (Sedyawati 2008: 10)

secara horisontal. Pluralisme di Indonesia harus dipandang sebagai kekayaan kultural yang senantiasa dipelihara, dengan sekaligus menjaga perlindungan atas identitas kultural dan membuka ruang yang lebih besar bagi multikulturalisme. Kunci penting dari hubungan horisontal itu adalah, antara lain, penghormatan pada identitas, toleransi pada kelompok lain, dan kehendak untuk mencari kebersamaan, bukan dengan menegaskan berbagai perbedaan, khususnya perbedaan yang bersifat primordial. Bina bangsa perlu merupakan proyek besar yang harus dirajut terus menerus melalui beragam institusi: sosial, budaya, ekonomi maupun politik. Istilah yang kedua, bina-negara, adalah proses demokratis untuk menanamkan, memelihara dan menjaga terlaksananya prinsip, kaidah dan tatakelola sistem politik dan pemerintahan demokratis (Anggoro 2009). Terlepas bahwa isu ini berkaitan dengan kebijakan politik Indonesia, penelitian arkeologi dituntut memberikan kontribusinya dalam menanamkan pemahaman wawasan kebangsaan.

2. Diskursi Pluralisme-Multikulturalisme di Maluku

Ada banyak penjelasan para ahli menyangkut definisi pluralisme-multikulturalisme yang tentu saja sangat diskursif, yang tak mungkin semuanya diuraikan dalam artikel singkat ini. Dalam artikel ini, penulis mengutip penjelasan pluralisme-multikulturalisme⁵ sebagai kearifan untuk melihat keanekaragaman budaya sebagai realitas fundamental dalam kehidupan bermasyarakat. Kearifan itu segera muncul, jika seseorang membuka diri untuk menjalani kehidupan bersama dengan melihat realitas plural sebagai kemestian hidup yang kodrati, baik dalam kehidupan dirinya sendiri yang multidimensional maupun dalam kehidupan masyarakat yang lebih kompleks, karenanya muncul kesadaran bahwa keanekaragaman

dalam realitas dinamik kehidupan adalah suatu keniscayaan yang tidak dapat ditolak, diingkari, apalagi dimusnahkan (Asyarie 2004)⁶. Multikulturalisme memerlukan ruang dinamis dan membuka dialog dengan berbagai kalangan lintas agama, sosial, ekonomi, politik, budaya, sebagai manifestasi dari filosofi multikulturalisme itu sendiri yang selalu berusaha menjauh dari jebakan penyempitan wawasan paradigmatisnya⁷. Dengan pemahaman ini, menurut penulis multikulturalisme semestinya diformulasikan sebagai tatanan sosial yang mengakomodasi ruang-ruang keberagaman identitas yang sekaligus memungkinkan bagi terintegrasinya keberagaman itu sendiri.

Maluku, tidak terbantahkan lagi merupakan bagian dari kedaulatan bangsa Indonesia, dan sebuah keniscayaan pula bahwa di wilayah Maluku juga tertanam tubuh kemajemukan. Maluku, didiami oleh berbagai suku bangsa, baik suku yang berasal dari lokalitas kepulauan Maluku sendiri, maupun dari luar kepulauan yang telah lama hidup dan bermukim maupun yang baru-baru saja tinggal di Maluku. Dan kini semuanya hidup berdampingan sebagai warga daerah Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Dalam pengertian yang sama Sihasale (2007) mengatakan Provinsi Maluku merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang terbentuk dari teritori-teritori yang didiami oleh berbagai sub suku bangsa, lazim mengklaim diri sebagai kelompok-kelompok yang menguasai teritori dimaksud (hak ulayat). Sebagai wilayah kepulauan yang dipersatukan melalui proses politik secara nasional, realitas sosial budaya di Maluku pada dasarnya bersifat multikultur dan berbagai sub etnik, dicirikan oleh simbol-simbol adat yang merepresentasi ruang-ruang kebudayaan pada masing-masing pulau dan atau gugus pulau, yang diakui mengandung diantaranya sejumlah kesamaan dan perbedaan.

Proses bermukimnya banyak suku bangsa adalah juga sebuah pengalaman budaya yang telah berlangsung sejak manusia pertama

5 Dalam penjelasan Simanjuntak (2006:7) dikatakan bahwa multikulturalisme berarti kemajemukan atau keanekaragaman, sebagai wujud penerapan konsep pluralisme dalam kehidupan berbudaya. Semua budaya pada prinsipnya mempunyai derajat yang sama sehingga menerima keberagaman budaya.

6 Khoirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hal. 87.

7 *Ibid*, hal 104.

kali mengenal migrasi, ribuan tahun lalu hingga masa sejarah datangnya masyarakat dan pedagang-pedagang asing seperti Cina, Arab dan bangsa-bangsa Eropa, serta pedagang Nusantara dari luar Maluku seperti Bugis, Makassar, Buton, Jawa, Bali, Sumatra dan sebagainya. Kini mereka telah hidup turun temurun dan menjadi bagian dari populasi dan budaya Maluku. Mereka semua adalah satu kesatuan komunitas warga negara yang terintegrasi dan bermukim di wilayah ini. Jika kita menyelami dengan sungguh-sungguh ruh kebudayaan, sejatinya ditengah keberagaman tak ada harmonisasi sosial yang semu, semua nyata terangkai sebagai hasil sebuah pengalaman budaya (*cultural experience*). Negara bangsa ini lahir melalui berbagai pengalaman sejarah dan budaya yang teramat panjang, dengan berbagai dinamika budaya yang amat kaya. Pengalam dan kearifan masa lalu teramat berharga untuk dipetik pelajarannya.

Tinggalan budaya masa lampau, dalam konteks arkeologi di wilayah Kepulauan Maluku, menunjukkan adanya karakteristik budaya lokal sebagai bentuk identitas masyarakat Maluku. Karakteristik budaya Maluku yang dinamis, merupakan bentuk kekayaan budaya yang majemuk, yang berakar pula dari persentuhan, pertemuan berbagai budaya yang terintegrasi di dalamnya. Sayangnya, pengungkapan arkeologis untuk melihat akar kemajemukan di Maluku masih minim. Dengan terpaksa saya katakan, diluar penelitian arkeologi yang telah dilakukan peneliti asing, penelitian oleh Puslitbang Arkenas atau bahkan Balar Ambon sendiri pun, masih sangat minim, membahas wacana multikulturalisme ini. Meski demikian, berbagai penelitian arkeologi baik yang dilakukan peneliti asing maupun arkeolog Indonesia, secara tidak langsung memberikan stimulus interpretatif tentang persoalan plurarisme dan multikulturalisme dalam konteks kekinian.

Penelitian arkeologi Maluku yang didominasi oleh para peneliti Australia dan Amerika, setidaknya telah mengungkap cikal bakal dan dinamika budaya pada etnis-etnis di wilayah Maluku. Survei arkeologi pertama di

wilayah itu dilakukan oleh Danny Miller dan Matius Spriggs pada tahun 1975 di Ambon, Haruku, Saparua, Seram Barat, Banda, dan Kei Kecil (Spriggs 1990). Penggalian ilmiah baru dimulai pada tahun 1990-91 dengan Peter Bellwood dan rekan-rekannya di Halmahera, Gebe dan Morotai (Bellwood 1992, 1998a, 1998b; Bellwood *et al.* 1993, 1998; Irwin *et al.* 1999) dan Wilhelm Solheim di Halmahera (Solheim 1998). Penelitian arkeologi selanjutnya telah dilakukan di Ambon, Buru dan Seram di Maluku Tengah oleh gabungan Indonesia-Universitas Tim Hawaii (Latinis 1999, 2000; Stark 1996; Stark dan Latinis 1992, 1996), dan di Banda oleh Peter Lape (2000a, 2000b).

Penelitian arkeologi yang signifikan di Maluku Tenggara mulai dengan proyek penelitian di Kepulauan Aru pada tahun 1995 (O'Connors *et al.* 2006), setelah beberapa sebelumnya eksplorasi arkeologi di Wilayah Kei Kecil (Ballard 1988, 1992; Spriggs dan Miller 1988). Laporan awal dari proyek penelitian itu, sebelumnya lebih awal telah dipublikasikan antara lain O'Connor *et al.* (2002a), Spriggs *et al.* (1998), dan Veth *et al.* (1998a, 1998b, 2000). Secara khusus bukti arkeologi di Kepulauan Aru menyoroti isu-isu berikut: *pertama*: sifat dan tingkat kolonisasi maritim dan pemukiman awal Homo Sapiens pada masa Pleistosen, dan dampak berikutnya dari pemukiman pada lanskap pulau yang sebelumnya kosong; *kedua*: tingkat konektivitas antar pulau, kontak dan pertukaran di masa awal Pleistosen dan Holosen, seperti yang ditunjukkan oleh bukti yang berkaitan dengan translokasi spesies hewan, tumbuhan dan batu eksotis. *Ketiga*: asal-usul dan waktu pengenalan pertanian dan domestikasi, hewan dan dorongan untuk pengembangan dan atau adopsi pertanian oleh masyarakat pra-pertanian. *Keempat*: interaksi antara kelompok-kelompok pribumi dan masuknya pemukim Austronesia, *kelima*: peran Aru sebagai pemasok bulu burung surge, produk hutan dan kelautan ke pasar dunia selama 2000 tahun terakhir atau lebih.

Situs lain untuk periode ini ditemukan oleh Peter Lape di Pulau Ay di Kepulauan Banda (2000a : 215-229, 2000b: 141). Diperoleh

pertanggalan yang dihasilkan dari identifikasi tulang mamalia, sekitar 3200 BP berhubungan dengan tulang babi dan ikan, rijang, batu obsidian dari sumber yang tidak diketahui dan tembikar slip merah dan dekorasi *tera* sebuah motif klasik penanda zona Lapita. Di wilayah Maluku Utara, Bellwood (2000) menguraikan hasil penelitiannya di Maluku Utara, setidaknya sejak 32.000 tahun yang lalu telah ada kegiatan manusia berlangsung yang ditemukan di Gua Golo dan Wetef, berupa alat serpih, batu koral untuk memasak, dan cangkang kerang laut yang terbakar. Bukti-bukti yang lebih banyak diperoleh menunjukkan kegiatan manusia mulai sekitar 12.000 tahun lalu. Dalam memulai penelitian di Maluku Utara pada tahun 1990, Bellwood mengidentifikasi empat pertanyaan utama pada tahap awal penelitian (Bellwood *et al.* 1993:20): *pertama*: pertanggalan pemukiman awal plestocen. *Kedua*: Peran yang dimainkan oleh daerah pemukiman Austronesia di Pasifik; *Ketiga*: Sifat interaksi antara dua kelompok populasi besar ethnolinguistic dari wilayah-Papua (atau Non-Austronesia) dan Austronesia - selama 4000 tahun terakhir, dan *keempat*: Sejarah perdagangan rempah-rempah dengan Cina, India dan Barat (lihat juga, Sprigs, 1998). Melanjutkan kajian Bellwood di Maluku Utara, terutama temuan arkeologi di Situs Gua Uattamdi, Sofwan Noerwidi (2003) mengurai tentang proses migrasi kolonisasi di wilayah Maluku Utara, yakni migrasi-kolonisasi budaya Non Austronesia-Austronesia yang mengaitkannya dengan kronologi situs Uattamdi seperti yang telah diidentifikasi oleh Bellwood (1993, 2000). Dari serangkaian dan berbagai penelitian arkeologi, sesungguhnya memberi kita perenungan bahwa sejak masa prasejarah (masa Plestocen-Holocen), telah ada gejala *multikulturalisme* ataupun *diversitas kultural*, ketika kita dihadapkan pada fenomena budaya asli (pribumi) kemudian pada masa awal migrasi, mulai bersentuhan dengan budaya Austronesia dan Non Austronesia. Artinya sejak masa itu sesungguhnya tidak ada *klaim*, bahwa kebudayaan di Maluku adalah homogen.

Selanjutnya pada periode yang lebih

muda lagi persentuhan dengan budaya luar, misalnya pada periode protosejarah dan sejarah⁸, meliputi masa paleometalik, tradisi megalitik, hingga sejarah terbentuknya kerajaan-kerajaan sebagai puncak-puncak peradaban awal zaman modern, lebih jelas lagi menandai dinamika multikulturalisme di Maluku. Kajian arkeologi terhadap penemuan berbagai nekara Tipe Heger, asal Dongson, Vietnam misalnya, menandai bentuk persentuhan awal budaya Maluku yang bernuansa ekonomis dan politis, dengan wilayah luar. Kemudian masa berdiri dan berkembangnya pusat peradaban Islam, sebagai contoh misalnya kota Ternate, berkembang karena berbagai persentuhan budaya masyarakat, dari identifikasi awal arkeologi, terdapat kantong-kantong pemukiman baik Melayu (Sumatra), Arab, Jawa, Bugis-Makassar dan juga Cina. Demikian pula di Kota Ambon dan beberapa kota berciri kolonial seperti Saparua, juga diidentifikasi beberapa toponim pemukiman, yang menunjukkan kantong pemukiman masyarakat dari luar wilayah. Namun kajian arkeologi masih perlu diperdalam lagi untuk menemukan berbagai bukti arkeologis yang lebih lengkap, mengingat kajian yang dilakukan masih menjangkau sebagian kecil toponim, yang sayangnya lagi minim data arkeologis. Namun identifikasi arkeologi ini membuktikan bahwa masa pengaruh Islam-kolonial, kota merupakan ruang sosial budaya yang juga tempat atau habitat hidupnya multikulturalisme. Jika multikulturalisme dipahami pula sebagai *diversitas kultural*, maka persentuhan dengan budaya luar, tentu menciptakan interaksi dan akulturasi. Dengan demikian pluralisme-multikulturalisme didalamnya juga bersangkut paut dengan masalah integrasi budaya. Dimana budaya yang berbeda-beda dan beragam, bertemu dalam wilayah yang sama, yang telah memiliki kebudayaan asli dan diantara kebudayaan-kebudayaan itu saling berbaur dan saling mengisi.

8 Kajian ini sebatas merangkum berbagai hasil penelitian maupun kajian arkeologi terkini (2006-2011) baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum ataupun tidak terpublikasi. Karena terbatasnya ruang, dengan terpaksa tidak diuraikan secara lengkap pada artikel ini.

3. Masyarakat Tradisional Maluku, Reintegrasi Sosial dan Azas Demokrasi

Masyarakat tradisional Maluku tumbuh dalam lingkungan masyarakat yang kental melanjutkan tradisi. Gejala integrasi sosial masyarakat Maluku, setidaknya dapat ditelusuri semenjak munculnya ruang sosial, komunitas etnik, yang hidup menetap dan telah mengenal religi, meskipun gejala ini kemungkinan berlangsung pada masa yang jauh sebelumnya. Penelusuran arkeologi masih terus dibutuhkan untuk mengkaji entitas budaya ini. Fakta-fakta adanya masyarakat tradisional yang saling berintegrasi, selayaknya terus diangkat dalam penelitian arkeologi. Integrasi sosial adalah isu (wacana) penting dalam sejarah konflik Maluku, sehingga diperlukan berbagai bentuk pendekatan baik secara akademis maupun dalam berbagai bentuk gerakan sosial dan gerakan moral. Salah satu gerakan moral sebagai bentuk reintegrasi sosial adalah gerakan *baku bae*. Gerakan ini adalah salah satu pendekatan resolusi konflik⁹ dari bawah. *Baku Bae* adalah gerakan moral dari masyarakat bawah korban konflik, untuk menghentikan kekerasan yang terjadi di Maluku. Kata *baku bae*, berasal dari dunia anak-anak di Maluku. Ketika anak-anak di Maluku akan berdamai setelah mereka berkonflik, mereka mengatakan *baku bae* (saling berbaikan). Gerakan ini merupakan bentuk reintegrasi sosial yang paling berhasil karena menggunakan mekanisme-mekanisme lokal yang ada di Maluku untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Salah satu mekanisme yang digunakan adalah melalui Pela atau relasi perjanjian satu atau lebih negeri lain dan kadang menganut agama yang berbeda. Karena tradisi yang ada hanya berlaku untuk dua atau tiga negeri maka digunakanlah istilah Pela Semesta yang melibatkan kurang lebih 700 negeri (Anggoro 2009). Data arkeologi menyumbangkan informasi berharga meskipun membutuhkan reinterpretasi baru, mengingat

tradisi panas pela, merupakan tradisi budaya yang berlanjut. Pemaknaan lebih dalam lagi menyangkut fungsi dolmen dalam masyarakat tradisional Maluku, setidaknya dan semestinya harus terus diaktualisasikan dalam konteks kekinian sebagai bentuk pendekatan akademis yang semestinya juga dapat diformulasikan sebagai gerakan sosial ataupun gerakan moral dalam upaya reintegrasi sosial.

Paling tidak dari kajian etnoarkeologi dapat ditarik interpretasi etnoarkeologi bahwa dolmen menjadi simbol integrasi sosial. Pada masa sekarang, biasanya dolmen di assosiasikan keletakannya dengan keberadaan Baeleo (Balai Pertemuan Adat). Posisi keletakan dolmen juga dianggap menunjukkan persekutuan masyarakat di Maluku, yakni kelompok Patasiwa dan Patalima¹⁰. Batu Meja kelompok Patasiwa merupakan batumeja yang orientasi keletakannya mengarah ke darat, sementara batumeja Patalima, keletakan berorientasi ke laut posisi dolmen terhadap baileo sangat bervariasi di masing-masing desa, apakah dolmen itu berada diantara bangunan baileo dan gunung atau antara baileo dengan laut (Mailoa 1977). Dolmen tiruan (replika dolmen) di pemukiman atau desa baru di Tuhaha misalnya, yang berassosiasi dengan keberadaan baeleo, saat ini digunakan sebagai medium pelantikan raja dan *panas pela*¹¹ (Salhuteru 2006; Diman Suryanto 1998; Ririmasse 2007). Demikian juga dolmen tiruan di Desa Saparua, dolmen ini difungsikan sebagai medium ritus adat perbaikan atap baeleu, panas pela dan upacara adat lainnya. Di Maluku Tenggara, tepatnya di Desa Waur, dolmen atau meja yang difungsikan sebagai pusat kampung atau Woma, juga difungsikan

9 Sejak awal bekerja sebagai peneliti di Balai Arkeologi Ambon, penulis sudah menggaungkan resolusi konflik melalui pendekatan arkeologi sebagai media harmonisasi sosial di Maluku yang rentan konflik, yang penulis tuangkan dalam tulisan berjudul *Pendidikan Arkeologi Merentang Jalan Harmonisasi, Renungan Untuk Maluku* (2006). Tampaknya wacana ini membutuhkan reaktualisasi dan formulasi baru untuk lebih mudah menjangkau konstituen.

10 Kelompok Patasiwa adalah kelompok masyarakat sembilan, sedangkan Patalima adalah kelompok masyarakat Lima. Dalam beberapa catatan etnografis, kelompok sembilan dan kelompok lima merupakan pembagian kelompok masyarakat yang masing-masing memiliki karakteristik budayanya sendiri.

11 Panas Pela adalah ritual adat untuk memelihara hubungan persaudaraan dan kerjasama yang telah terjalin oleh dua kampung. Pada upacara ini biasanya diucapkan ikrar seperti ini "*Upu lanite e! Sei hale hatu Hatu ale ei*", yang berarti "Tuhan di langit, siapa membalikkan batu, batu akan membalikkan dia". Dapat diterjemahkan secara bebas seperti berikut: Dengan nama Tuhan Allah di langit, barang siapa yang melanggar janji dia akan dimakan janji itu sendiri. Sejak itu mereka telah berjanji saling tolong menolong (Mailoa 1986: 73-74).

sebagai medium ritus adat. Berdasarkan informasi penduduk, pada saat pelantikan raja atau misalnya, sekelompok orang (terutama diwakili kaum perempuan) menari sambil berdendang yang berisi puji-pujian terhadap leluhur dengan bahasa adat (*bahasa tanah*) dan bergerak mengelilingi batu meja atau *woma* tersebut (pers.com, 2007; Handoko 2010).

Berdasarkan penelitian, menyebutkan dolmen di wilayah Maluku biasanya diberi nama sesuai dengan *soa*¹² atau kelompok sosial dalam sebuah wilayah negeri atau desa. Di Desa Kaibobo, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Maluku Tengah ditemukan dolmen yang juga disebut *hatu tala*. Di Desa Tuhaha, Pulau Saparua dolmen yang terletak di negeri Lama Bukit Huhule berasal dari nama *soa* yang ada dalam struktur desa Tuhaha (Suryanto 1998, Salhuteru 2006, Ririmase 2007). Dari informasi tersebut dapat ditarik interpretasi etnoarkeologi bahwa dolmen menjadi simbol ikatan integrasi, mengingat penamaan dolmen berdasarkan nama *soa*, dan hingga saat ini *soa-soa* tersebut masih hidup dan tetap menjadi bagian dari komunal wilayah negeri atau desa sekarang ini. Meskipun setiap *soa* memiliki dolmen sendiri, namun setiap *soa* merupakan bagian integral dari komunitas negeri atau desa. Kenyataan sekarang, posisi dolmen yang berasosiasi dengan *baeleo* yang diperuntukkan bagi pertemuan adat seluruh *soa*, hanya berjumlah satu buah yang digunakan untuk seluruh *soa*. Pada masa sekarang berarti lebih tegas lagi, posisi dolmen sebagai simbol integrasi sosial (Handoko 2010).

Di daerah Maluku, dolmen selain sebagai media pemujaan juga media dan simbol organisasi adat atau persekutuan antar individu dan kelompok masyarakat (Sudarmika 2000: 288-289). Dijelaskan Sudarmika, bahan baku dolmen berasal dari wilayah yang jauh dari lokasi ditemukannya situs. Oleh karena itu proses pengerjaannya dilakukan secara gotong

royong oleh masyarakat, terutama dalam hal pengangkutan bahan baku batu ke lokasi situs, keberadaan dolmen diyakini masyarakat sebagai wujud kerukunan masyarakat masa lampau. Gejala reintegrasi sosial lainnya dalam kacamata arkeologi misalnya juga dengan adanya penemuan mangkuk perunggu dengan ukiran dua naga yang ekornya berbelitan di situs Iha dan diperkirakan berangka tahun 1692. Simbol dua naga yang saling menyatu itu, bermakna menyatunya dua kelompok masyarakat *Siwa* dan *Lima* (Suantika dan Sudarmika 2005:17). Interpretasi arkeologi ini setidaknya mendukung ingatan kolektif terhadap perjalanan sejarah negeri-negeri di wilayah Maluku seperti yang dijelaskan oleh Putuhena (2003) dalam buku *Mematahkan Kekerasan Dengan Semangat Bakubae* menuliskan budaya *Siwa Lima* merupakan persaudaraan antara dua komunitas yang berbeda iman. Berdasarkan *Siwa Lima*, perbedaan tersebut merupakan kesepakatan budaya, artinya daerah Uli Siwa menerima Kristen (Abad XVI), sementara daerah Uli Lima memeluk Islam (XV). Dengan kata lain penerimaan agama (Islam dan Kristen) pada masa itu adalah sebuah konsensus budaya untuk melestarikan negeri Maluku (Putuhena 2003). Dalam konsensus budaya itu, terkandung semangat toleransi masyarakat. Misrawi (2008) mengutip pendapat Rainer Forst dalam "*Tolerantion and Democracy*" (2007) mengatakan bahwa konsepsi toleransi dilandasi pada kultur dan kehendak untuk membangun pengertian dan penghormatan terhadap yang lain (*respect conception*), sebuah konsep toleransi dalam konteks demokrasi harus mampu membangun saling pengertian dan saling menghargai ditengah keragaman suku, agama, ras, dan bahasa. Untuk membangun toleransi sebagai nilai kebajikan setidaknya ada dua modal yang dibutuhkan, yaitu: Pertama, toleransi membutuhkan interaksi sosial melalui percakapan dan pergaulan yang intensif. Kedua, membangun kepercayaan di antara pelbagai kelompok dan aliran. Makna toleransi pada masyarakat tradisional Maluku, lebih dalam lagi, karena tidak hanya mengikat secara individu-individu namun telah menjadi

12 Biasanya satu *soa* adalah gabungan beberapa keluarga (atau umum disebut mata rumah) dan memiliki hubungan kekerabatan mengikuti garis keturunan ayah. Pada awalnya jabatan kepala *soa* adalah jabatan turun temurun. Perkembangan masa selanjutnya menunjukkan jabatan kepala *soa* biasanya dipilih dari anggota *soa*. Dengan demikian bentuk pemerintahan dan kepemimpinan di Maluku bersifat kolektif (Ririmasse 2007: 37).

tatanan sosial bagi seluruh komunitas, artinya sebagai konsensus budaya, sikap toleransi sudah menjadi semacam ikatan kolektif.

Pada masa pengaruh Islam, simbolisasi integrasi sosial dan toleransi misalnya dari bukti arkeologis Masjid Kuno Marimahatuhaha di Pulau Haruku (Handoko 2011). Pulau Haruku, terdapat persekutuan 5 (lima) negeri atau desa Islam yakni Negeri Pelauw, Kailolo, Kabauw, Rohomoni, dan Hulaliu yang disebut sebagai Uli Hatuhaha, masing-masing juga memiliki pemerintahan otonom, namun menyatukan diri dalam persekutuan negeri-negeri Islam yang disebut Amarima Hatuhaha yang berpusat di desa Rohomoni. Dari kelima negeri itu, pada masa kolonial, Negeri Hulaliu mengkonversi menjadi negeri Kristen, namun secara adat tetap menjadi bagian dari persekutuan atau persaudaraan Uli Hatuhaha, sehingga dalam kegiatan-kegiatan tradisi dan ritual Islam, kadangkala masih dilibatkan. Bukti arkeologis menyatunya kekerabatan Amarima Hatuhaha ini yakni dengan dibangunnya masjid kuno yang dinamai Masjid Hatuhaha. Berkaitan dengan bukti arkeologis masjid kuno ini, terdapat syairkapata¹³ menyiratkan bahwasanya masjid menjadi simbol pemersatu masyarakat, bahkan dengan masyarakat Hulaliu¹⁴ yang sudah menjadi Kristen. Oleh sebab itu untuk mengenang saudaranya yakni Negeri Hulaliu yang dulu Muslim sejak pengaruh Portugis beralih ke Kristen, maka di Masjid Hatuhaha di Rohomoni, dibangun masjid yang lebih kecil yang dibuat bersambung dengan masjid Hatuhaha, sebuah masjid yang dikenal sebagai masjid Hulaliu. Dengan demikian tampak

bahwa masjid Hatuhaha, terdiri dari dua bangunan, yakni bangunan utama masjid Hatuhaha dan bangunan pengikut yang bersambung atau menyatu dengan bangunan utama, yakni masjid Hulaliu yang berukuran lebih kecil dan bersambung dengan beranda atau serambi masjid. Integrasi bangunan ini, menampakkan satu bangunan utuh masjid Hatuhaha, meskipun sesungguhnya dalam filosofi masyarakat Hatuhaha, terdiri dari dua bangunan yakni bangunan masjid utama yang menyimbolkan integrasi empat negeri Islam dengan bangunan masjid yang lebih kecil yang menyimbolkan negeri Hulaliu yang sudah menjadi Kristen.

Simbol integrasi sosial lainnya pada masyarakat tradisional Maluku, misalnya adalah keberadaan *Baeleo*, sebagai salah *ikon* utama budaya kekerabatan orang Maluku. Baeleo adalah salah satu bangunan terpenting di tengah-tengah negeri di Maluku. Baeleo adalah tempat tetua desa mempertimbangkan masalah-masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan desa, semacam balai kota yang digunakan dewan desa untuk bersidang ataupun pertemuan-pertemuan yang lebih luas yang mencakup semua kepala keluarga di desa. Penjelasan tersebut memberi kesan bahwa baeleo paling tepat ditempatkan di lingkungan desa. Baeleo juga seperti rumah adat, merupakan manifestasi fisik sebagai persekutuan adat¹⁵ (Cooley 1984).

Fungsi Baeleo yang demikian, sesungguhnya menyiratkan dasar-dasar filosofis, kearifan lokal masyarakat dalam konsep demokrasi masyarakat tradisional Maluku. Baeleo adalah tempat bermusyawarah seluruh wakil lapisan masyarakat, tempat menemukan penyelesaian berbagai persoalan negeri dengan jalan musyawarah dan mufakat. Makna filosofis tentang demokrasi berdasarkan simbolisasi baeleo dan rumah

13 Kapata adalah bahasa daerah Maluku yang artinya tradisi menurut peristiwa-peristiwa sejarah masa lampau dalam bentuk nyanyian bersyair.

14 Dalam tradisi tutur masyarakat di Pelauw, Rohomoni, Kabauw, Kailolo dan Hulaliu, mengungkapkan bahwa pada masa lampau kelima negeri itu merupakan negeri-negeri muslim, namun Hulaliu pada masa pengaruh Portugis, dikonversi menjadi Katolik. Dalam tradisi lisan masyarakat, Hulaliu merupakan bentuk pengorbanan masyarakat pada masa itu, agar Kerajaan Hatuhaha tetap berdiri. Pada suatu perjanjian dengan Portugis, disebutkan jika Kerajaan Hatuhaha ingin tetap ada dan tidak dihancurkan Portugis, maka harus ada saudara yang dikorbankan untuk memenuhi tuntutan Portugis menkonversi agamanya ke agama Katolik. Selanjutnya berdasarkan perundingan kelima negeri, maka Hulaliulah yang berkorban dengan mengikuti kemauan Portugis, yakni mengkonversi agamanya ke Katholik, agar kerajaan Hatuhaha tetap tegak berdiri (Wawancara dengan tokoh masyarakat Hulaliu, Maret 2010).

15 Baeleo juga disebut rumah tua desa, rumah pusaka dari klan-klan sebagai tempat untuk menyimpan pusaka, semua alat-alat yang mereka percayai memiliki makna dan kekuatan khusus (gaib) karena pusaka-pusaka dan alat-alat memiliki kaitan dengan para leluhur, tempat orang membicarakan, memutuskan segala hal yang berkaitan dengan kesejahteraan klan atau pribadi di dalam kelompok. Jika demikian halnya semua upacara adat yang ada hubungannya dengan persekutuan desa sebagai keseluruhan harus dilaksanakan di desa (Cooley 1984).

adat misalnya pada pola keruangan suku Nuauulu. Keberadaan rumah marga di tengah kampung merupakan representasi pengendali pemerintahan, dari marga terbesar sebagai pemegang suara mayoritas. Konsep demokrasi direpresentasikan oleh kepemimpinan dari marga Sonawe sebagai marga terbesar, yang dapat disejajarkan sebagai perwakilan suara mayoritas. Demokrasi direpresentasikan oleh kuantitas suara marga dalam satu komunitas. Rumah marga Sonawe dapat dianggap mewakili dimensi sosial dan politik kehidupan demokratis masyarakat Nuauulu. Dengan demikian, kepemimpinan marga Sonawe dapat dianggap sebagai sebuah konsensus adat. Seluruh komunitas telah bersepakat, bahwa pemegang kendali pemerintahan layak diberikan kepada marga yang memiliki suara terbesar (terbanyak). Kesimpulannya, dari segi sosial dan politik, sejak dulu masyarakat Nuauulu telah membangun sebuah konsensus demokrasi sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan adat. Pelajaran berharga sesungguhnya dapat digali dari semangat ini. Sebagai sebuah konsensus adat, maka marga Sonawe sebagai marga terbesar mendapat tempat atau hak menjadi pemimpin adat dengan legitimasi kuat dari marga lainnya (Handoko dan Suantika 2010). Dalam konteks keindonesiaan, filosofi demokrasi *ala* masyarakat tradisional Maluku, bisa menjadi pelajaran berharga bagi bangsa ini, bahwa dari kearifan lokal masa lalu telah lahir azas demokrasi sendiri, bukan demokrasi yang lahir dari Barat.

4. Catatan Penutup: Reorientasi dan Reaktualisasi Penelitian Arkeologi

Terlalu sederhana jika kita berpikir, bahwa penelitian dan pemasyarakatan arkeologi sudah berhasil, jika indikatornya hanya apresiasi masyarakat, sebab yang penting bagaimana hasil penelitian bisa diaktualisasikan dalam kehidupan sosial budaya masyarakat, menjadi landasan secara etis, moral, kultural maupun politis bahkan yuridis kehidupan masyarakat dan bernegara. Makna filosofis yang diceraup dari data arkeologi mampu menjadi bahan perenungan,

atau refleksi dan kontemplasi. Selanjutnya menjadi dasar-dasar atau pola-pola relasional bermasyarakat dan bernegara. Sebagai contoh, bukti-bukti integrasi sosial masyarakat masa lampau dari hasil interpretasi arkeologi, bisa menjadi rumusan tentang aturan atau norma-norma kehidupan adat di masyarakat-masyarakat tradisional, selanjutnya bahkan menjadi regulasi di tingkat masyarakat yang lebih luas. Ini semua bisa dijalankan, jika kita mampu menemukan formulasi bagaimana mengaktualisasikan data arkeologi hasil penelitian itu. Oleh karena itu penelitian arkeologi seharusnya tidak hanya mampu menemukan makna tinggalan arkeologi saja, namun juga mampu menemukan formulasi agar makna dari tinggalan arkeologi dapat diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sekaligus mempertegas berbagai upaya rekonsiliasi konflik dan integrasi sosial masyarakat tradisional yang selama ini telah berjalan.

Hal diatas menjadi dasar dan kalimat penegasan dari penulis kepada kita semua para peneliti dan pemangku kebijakan dalam bidang arkeologi, bagaimana komitmen kita dalam orientasi penelitian arkeologi di masa-masa mendatang. Untuk menuju kondisi ideal itu, tidak hanya dibutuhkan manajemen penelitian yang baik, namun juga orientasi dan idealisme penelitian arkeologi itu sendiri. Kebijakan menyangkut penelitian arkeologis sudah semestinya mengikuti arah atau orientasi baru sebagaimana paradigma arkeologi baru yang tidak hanya menyangkut kepentingan akademis dan ideologis yang berwacana pada tataran konseptual belaka, namun juga kebermaknaannya dalam kehidupan masyarakat, dalam konteks ini diaktualisasikan sebagai fungsi membangun sebuah tata aturan dan regulasi dalam kehidupan sosial masyarakat dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan.

Kita kemudian akan bertanya sejauh mana konsepsi ini dapat diimplementasikan, jawabannya terletak pada orientasi penelitian arkeologi itu sendiri, baik menyangkut manajemen penelitian, komitmen dan idealisme peneliti dan yang terpenting regulasi di tingkat birokrasi, yang tentu saja mesti didukung oleh *political* dan *good will* pimpinan atau pemangku

kebijakan dalam bidang penelitian arkeologi dari tingkat paling bawah hingga hirarki yang tertinggi. Tentu kita menjadi *resisten*, ketika tuduhan bahwa kesadaran akan kebudayaan telah menjelma menjadi kesadaran palsu karena apa yang disebut sistem budaya lebih merupakan birokratisasi dimana nilai kebudayaan terbonsai dalam fungsionalisme birokratik, menjelma aparat negara yang tentu mengamini sistem politik secara keseluruhan, sebuah *common sense* yang mendaulat kebudayaan dalam domain yang digerakkan melalui formalisme institusional dengan segenap atribut simbolisme, maka pendidikan kebudayaan tak lebih hanya nostalgia masa lalu yang kering akan kesadaran filosofis (Putra 2010: 341).

Sebagai arkeolog, peneliti kebudayaan yang sekaligus aparat negara, tentu kita perlu menjawab tuduhan ini. Tentu kita akan merenungkan sejauh apa kinerja penelitian yang selama ini kita lakukan. Apakah sejauh ini telah menjadi energi yang mampu menggerakkan instrumen kebudayaan agar mampu menghasilkan produk dan jasa kebudayaan, antara lain dalam melahirkan regulasi dan tatanan sosial kehidupan masyarakat, atau justru kita bersembunyi di balik fungsionalisme birokratis yang *berkebudayaan* lantaran karena formalisme institusional dan kemudian menjebak kita pada pragmatisme karena fasilitas administratif negara. Ini perlu direnungkan sebagai bagian menjalankan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang telah menjadi amanat dan komitmen bangsa di jaman pemerintahan sekarang. Ini juga sebagai upaya menjawab pihak-pihak yang semakin hari semakin *menggugat* arkeologi. Barangkali pandangan ini sama sebagaimana Fadillah (2001) ungkapkan bahwa arkeologi dihadapkan pada tuntutan akuntabilitas publiknya, namun sejauh ini – seharusnya kita akui - penelitian arkeologi cenderung menghasilkan lebih banyak pada *akuntabilitas administratif* (Fadillah 2001: 58). Padahal institusi arkeologi sebagai salah satu instrumen kebudayaan, alat negara, memiliki tanggungjawab yang besar turut mengatasi persoalan kebangsaan guna turut menjamin relasi sosial semakin kondusif.

Di Maluku, sejak berdirinya Balai Arkeologi Ambon, patut diakui masih minim data untuk memberikan lebih banyak informasi dan kecerahan makna filosofis dalam serangkaian makna data arkeologis tentang persoalan kebangsaan. Tuntutan tanggungjawab ini semakin besar, ketika dihadapkan pada persoalan budaya Maluku merupakan diskursus yang sangat sensitif dan penuh dialektika (Handoko 2006b). Patutlah kita renungkan, apa yang disampaikan Abidin Wakano (2008) seorang akademisi dan tokoh Lembaga Antar Iman Maluku (LAIM) yang mengatakan, jika identitas kultural masyarakat Maluku ini tidak ditransformasikan menjadi kekuatan perekat dan kekuatan resolusi konflik dalam masyarakat multikultural maka masyarakat akan menjadi strukturalis – mekanik dan akan selalu tunduk kepada aturan - aturan formal yang sangat *top down* dan militeristik, melemahnya identitas – identitas kultural mengakibatkan pendarahan pada ranah kebudayaan. Implikasinya akan menghancurkan masa depan *civil society* di wilayah ini. Sebaliknya penguatan identitas kultural tersebut, akan sangat berarti bagi terbangunnya *civil society*. Untuk itu, rekayasa sosial pada ranah kebudayaan dengan mentransformasikan identitas – identitas kultural seperti *pela*, *gandong* merupakan suatu keniscayaan bagi masa depan peradaban Maluku yang multikultural.

Menyimak hal ini, maka betapa pentingnya kajian-kajian arkeologi (sebagai salah satu pendekatan ranah kebudayaan) di masa-masa mendatang sebagai sebuah pekerjaan rumah, yang memerlukan keseriusan dan refleksif. Bahwa persoalan pluralisme-multikulturalisme, integrasi kebangsaan dan demokratisasi merupakan wacana mendasar dan bukanlah suatu yang *utopis* jika arkeologi menjadi alat pendekatan untuk menemukan ruh kebudayaan dan nasionalisme dalam *kepelbagaian*. Pekerjaan rumah yang paling penting adalah bagaimana memformulasikan kebermaknaan tinggalan arkeologi agar mampu mentransformasikan khasanah akademis menjadi gerakan moral sebagai bagian dalam upaya membangun resolusi dan rekonsiliasi konflik.

Daftar Pustaka

- Anggoro, Koenanto. 2009. *Post Conflict Peacebuilding: Reference Manual untuk Masyarakat Sipil*. Jakarta: Kerjasama Pro Patria Institute dan USAID.
- Bellwood, P., A. Waluyo, Gunadi, G. Nitihaminoto, and G. Irwin. 1993. "Archaeological research in the northern Moluccas: interim results, 1991 field season". *Bulletin of the Indo-Pacific Prehistory Association*, 13:20–33.
- Bellwood, Peter. 2000. *Prasejarah Kepulauan Indo Malaya*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Edisi Revisi.
- Cooley, Frank 1984 *Mimbar dan Tahta*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.
- Fadillah, Moh. Ali. 2001. "Nasionalisme dan Etnisitas, Relevansinya dalam Penelitian Arkeologi", dalam Irfan M. Mahmud (ed.), *Memediasi Masa Lalu Spektrum Arkeologi dan Pariwisata*. Makasar: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin (Lephas) dan Balai Arkeologi Makasar.
- Handoko, Wuri. 2006. "Pendidikan Arkeologi, Merentang Jalan Harmonisasi", *Kapata Arkeologi. Jurnal Arkeologi Wilayah Maluku dan Maluku Utara*, Vol 1/ No. 1. Ambon: Balai Arkeologi Ambon.
- . 2006b. "Arkeologi Komunitas Pengelolaan Informasi dan Pengembangan Penelitian Arkeologi di Indonesia. Sebuah Pendekatan untuk Wilayah Penelitian di Maluku". *Evaluasi Hasil Penelitian Arkeologi*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional.
- . 2010. "Dolmen Orang Maluku: Eksistensi Religi, Adat dan Integrasi Sosial (Tinjauan Etnoarkeologi)", *Papua*. Jayapura: Balai Arkeologi Jayapura.
- . 2011. "Islam dan Dinamika Budaya Lokal di Pulau Haruku". Laporan Penelitian. Ambon: Balai Arkeologi Ambon. Tidak diterbitkan.
- Handoko, Wuri dan I Wayan Suantika. 2010. "Ritual, Religi dan Kosmologi Pola Kampung Adat Suku Nuaulu Pulau Seram", *Forum Arkeologi*, No. 1. Denpasar: Balai Arkeologi Denpasar.
- Khoirul, Mahfud. 2006. *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lape, P.V. 2000a. "Contact and Conflict in the Banda Islands, Eastern Indonesia, 11th to 17th Centuries". PhD thesis, Brown University, Rhode Island.
- . 2000b. Political Dynamics and Religious Change in the Late Pre-colonial Banda Islands, Eastern Indonesia. *World Archaeology*, 32(1).
- Launa. 2011. *Menyoal Watak Bangsa* (<httpwww.radarbanten.comnewversionopini1391-menyoal-watak-bangsa>, diakses tanggal 30 Agustus 2011).
- Mahmud, Irfan M. 2002. "Askripsi Keindonesiaan: Pondasi Jaringan Nasionalitas dan Otonomi 'Bangsa' di Sulawesi Selatan", dalam Irfan M. Mahmud dkk. (ed.), *Tradisi, Jaringan Maritim, dan Sejarah Budaya*. Makasar: Lembaga Penerbitan Univeritas Hasanuddin (Lephas).
- Maiola J. 1977. *Glance at the Moluccas*. Denpasar: Dharma Bakti.
- . 1986. *Sistem Gotong Royong Dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Maluku*. Ambon: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Maluku.

- Misrawi, Zuhairi. 2008. "Toleransi Sebagai Kuasa Nilai", *Kompas* 24 Mei 2008.
- Nurkhoirun, M. 2005. "Agama dan Kebudayaan Menjelajahi Isu Multikulturalisme dan Hak-hak Minoritas di Indonesia dalam Budiman", dalam Hikmat (ed.), *Hak Minoritas Dilema Multikulturalisme di Indonesia*. Jakarta. Tifa Foundation dan The Interseksi Foundatioan.
- O'Connors, Sue. *et al.* *The Archaeology of the Aru Islands, Eastern Indonesia*. Canberra: Australian National University Press
- Putra, Muhammad Herly. 2010. "Menuju Struktur Kebudayaan Kita", epilog dalam Syaiful Arif, *Refilosofi Kebudayaan. Pergeseran Pasca Struktural*. Yogyakarta: Arruz Media.
- Putuhena, Saleh. 2003. *Mematahkan Kekerasan dengan Semangat Baku Bae*. Jakarta: Gerakan Baku Bae dan YAPPIKA.
- Ririmasse, Marlon Nr. 2007. "Dolmen dan Struktur Sosial Masyarakat Tuhaha, Maluku Tengah". *Amerta. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional
- Salhuteru, Marlyn. 2006. "Tinggalan Megalitik di Desa Tuhaha Kecamatan Saparua Maluku Tengah", *Kapata Arkeologi*, Vol. 2 No.3. Ambon: Balai Arkeologi Ambon.
- Sedyawati, Edi. 2008. *Keindonesiaan dalam Budaya*. Jakarta. Wedatama Widya Sastra
- Sihasale, WR. "Peran Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku (LKDM) dalam mengaktualisasikan Kearifan Lokal dan Pengembangan Budaya di Maluku", makalah dalam Diskusi Arkeologi di Ambon.
- Spriggs, Matthew. 1998. "Research Questions in Maluku Archaeology". *Cakalele*, Vol. 9, No. 2: 51-64. Australia: Australia National University.
- Simanjuntak, Truman. 2006. *Pluralisme dan Multikulturalisme dalam Prasejarah Indonesia, Penelusuran terhadap Akar Kemajemukan Masa Kini*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional.
- Suantika, I W. dan Sudarmika G.M. 2001. "Situs Iha, Kecamatan Saparua, Maluku Tengah", Laporan Penelitian Arkeologi. Ambon: Balai Arkeologi Ambon. Tidak diterbitkan
- Suryanto, Diman. 1998. Penelitian Arkeologi di Desa Tuhaha dan Iha, Kecamatan Saparua. Kabupaten Maluku Tengah. Laporan Penelitian Arkeologi. Ambon: Balai Arkeologi Ambon. Tidak diterbitkan.
- Sudarmika, G.M. 2000. "Tinggalan Arekologi Sebagai Wahana Pemersatu Unsur Bangsa", *Mencermati Nilai Budaya Masa Lalu dalam Menatap Masa Depan. Proceeding EHPA Bedugul 14-17 Juli*. Jakarta: Proyek Peningkatan Penelitian Arkeologi.
- Wakano, Abidin. 2008. *Identitas Kultural Maluku Sebagai Modal Kultural Orang Basudara*. Makalah dalam Lembaga Antar Iman Maluku (LAIM) di Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat.